



LKj-IP 2024

DISDIKBUD PROV. JATENG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	4
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	5
1.4 Sistematika Penulisan	9
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	10
1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Realisasi Anggaran	67
3.3 Inovasi.....	70
3.4 Penghargaan	75
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Rekomendasi.....	82
LAMPIRAN	85
- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	86
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Sebaran Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	5
1.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	7
1.3. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	9
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.....	14
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	15
2.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	16
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	17
2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	19
2.6 Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	20
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	34
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	36
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2026.....	41
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026	43
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	44
3.6 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	47
3.7 Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	49
3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	67



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah..... 5

2.5.1 Tampilan aplikasi e-planing.jatengprov.go.id..... 29

2.5.2 Tampilan aplikasi e-budgeting.jatengprov.go.id..... 30

2.5.3 Tampilan aplikasi e-RKO.jatengprov.go.id 30

2.5.4 Tampilan aplikasi e-Controlling.jatengprov.go.id 31

2.5.5 Tampilan aplikasi duren pulen Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah..... 32

2.5.6 Tampilan aplikasi data guru.pdkjateng.go.id..... 32

2.5.7 Tampilan aplikasi e-gtptt.pdkjateng.go.id..... 33

2.5.8 Tampilan aplikasi LKP (was.pdkjateng.go.id) 33





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pergub No. 42 dan 78 tahun 2021 serta 18 tahun 2023 Tentang SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024 - 2026 serta Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Semarang, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATIN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran yang layak. Artinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasa 28c ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat kedua urusan tersebut bersifat saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia.

Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang. Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sejalan dengan Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 18 dan 78 tahun 2021 serta 18 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan provinsi. Segala bentuk aktivitas dalam upaya penanganan permasalahan pada urusan pendidikan dan kebudayaan harus bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

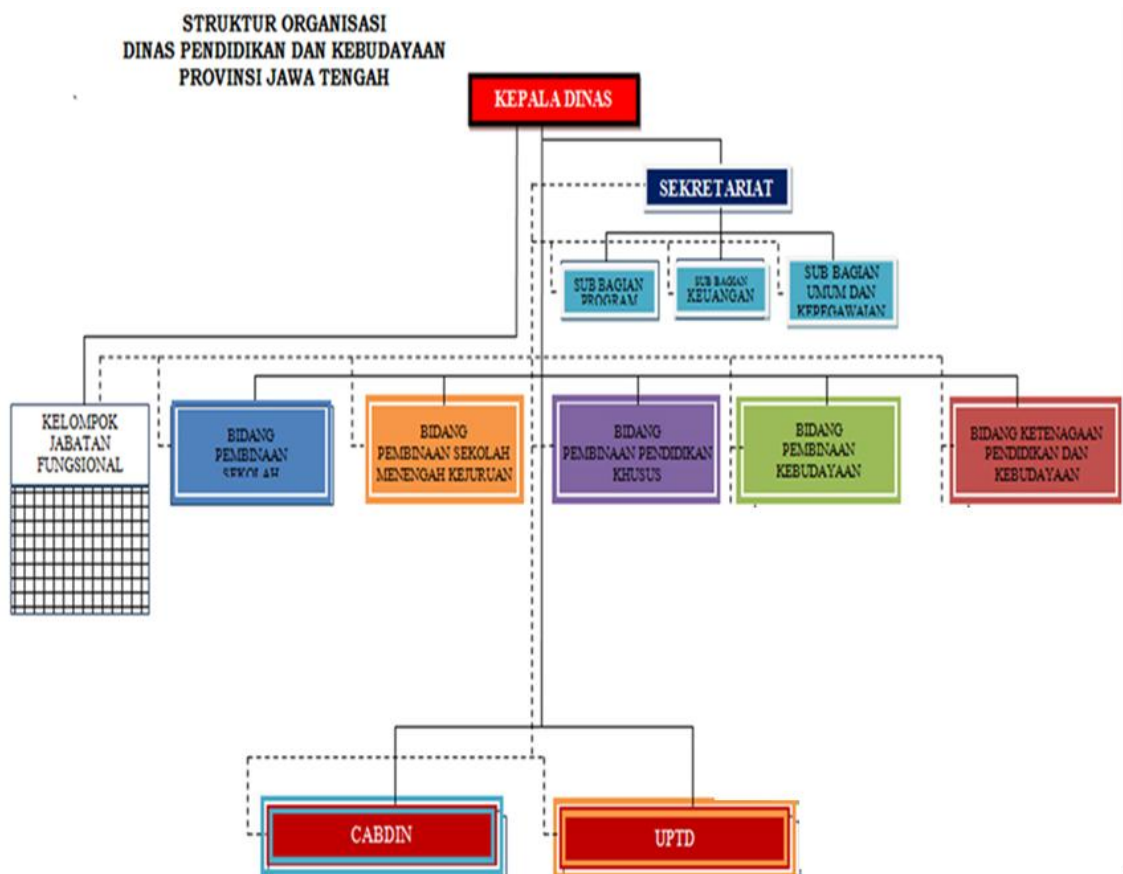
bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan madat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maka program kegiatan Disdikbud dapat diuraikan kedalam sebuah peta proses bisnis. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



1.2 Isu- Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2024 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 73,39 mampu tercapai lebih tinggi yaitu 72,88 namun capaian ini masih dibawah angka nasional sebesar 74,39. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 12,86 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,02 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII. Isu pendidikan yang penting

diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat. Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah terutama usia produktif akan menjadi beban yang berat dalam lima tahun ke depan apabila tidak diantisipasi sejak saat ini.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai implementasi kurikulum merdeka;
2. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan Penyelarasan kurikulum yang adaptif serta implementasi penerapan pendidikan karakter ke dalam pengembangan kurikulum sebagai wujud penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi kompetensi siswa, dan pembinaan kesiswaan.
4. Peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan dengan pengelolaan manajemen sekolah dan pembiayaan sekolah serta pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah (ARKAS, MARKAS, SIPERKASA)
5. Penguatan nilai budaya dan karakter masyarakat melalui pemajuan kebudayaan di masyarakat, internalisasi kurikulum muatan lokal dengan nilai budaya dan karakter, pengelolaan dan pemanfaatan kebudayaan serta pelestarian kesenian tradisional

1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

a. SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

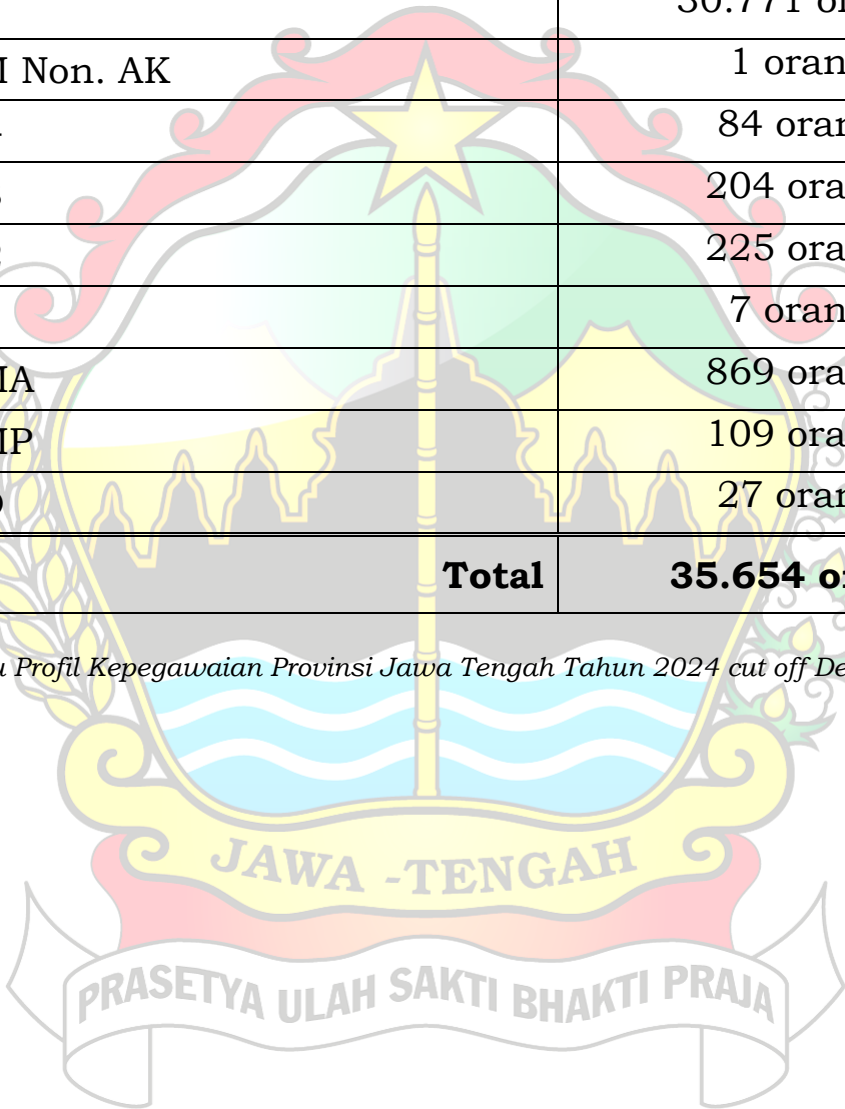


Jawa Tengah dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 sebanyak 35.654 orang sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Sebaran Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	20 orang
2	S2	3.337 orang
3	S1	30.771 orang
4	SM Non. AK	1 orang
5	D4	84 orang
6	D3	204 orang
7	D2	225 orang
8	D1	7 orang
9	SMA	869 orang
10	SMP	109 orang
11	SD	27 orang
Total		35.654 orang

Sumber : Buku Profil Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 cut off Desember 2024





b. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2024		PENAMBAHAN								PELEPASAN				SALDO AKHIR	
												REKLASIFIKASI				Periode 202412	
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Ke Aset Lainnya			Jml.	Jumlah Kurang
														BMD			
1	2	3		4		7		9		14		17		22		23	
1	1.3.1.01	5	69.528.600.000	-	-	1	2.085.246.000	-	-	1	2.085.246.000	-	-	-	-	6	71.613.846.000
2	1.3.2.01	6	1.675.775.309	1	199.500.000	-	-	-	-	1	199.500.000	-	-	-	-	7	1.875.275.309
3	1.3.2.02	26	4.494.544.700	-	-	-	-	1	14.950.000	1	14.950.000	-	-	-	-	27	4.509.494.700
4	1.3.2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.2.05	3.440	18.541.885.706	65	398.080.000	-	-	-	-	65	398.080.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3.504	18.938.965.706
7	1.3.2.06	394	4.087.564.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	4.087.564.444
8	1.3.2.07	67	529.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	529.050.000
9	1.3.2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10	796	15.876.129.660	33	529.850.000	-	-	-	-	33	529.850.000	2	10.259.524	2	10.259.524	827	16.395.720.136
12	1.3.2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.3.01	12	12.834.839.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12.834.839.400
22	1.3.3.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.3.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04	3	573.193.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	573.193.250
25	1.3.4.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.03	3	688.085.152	3	44.721.750	-	-	-	-	3	44.721.750	-	-	-	-	6	732.806.902
28	1.3.4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.5.01	10.385	343.974.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.385	343.974.164
30	1.3.5.02	12	68.919.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.919.000
	KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA																
31	1.3.5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.3.5.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.3.6.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15.149	129.242.560.785	102	1.172.151.750	1	2.085.246.000	1	14.950.000	104	3.272.347.750	3	11.259.524	3	11.259.524	15.250	132.503.649.011



c. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tabel 1.3. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.) ANGGARAN PERUBAHAN
5	BELANJA DAERAH	8.617.335.841.000
5.1	BELANJA OPERASI	7.822.810.953.000
5.1.1	Belanja Pegawai	4.836.837.109.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.690.014.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.330.507.830.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.776.000.000
5.2	BELANJA MODAL	794.524.888.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.088.949.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.117.251.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.680.000
5.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	85.167.008.000

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta langkah perbaikan internal OPD yang berisi tindak lanjut dari rekomendasi LKjIP tahun sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan satndar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4. Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar : 1. Menyelaraskan formulasi	Target Perjanjian Kinerja Perubahan yang sesuai dengan E-Controlling Kinerja Data Dukung :



No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	target antara perjanjian kinerja dengan penjabaran target triwulan dalam e-Controlling kinerja	1. Dokumen PK Perubahan Eselon II 2. <i>Screenshot E-Controlling</i> Kinerja indikator Tujuan dan Sasaran
2.	Menyusun dan menetapkan pedoman beserta instrument pemberian reward dan punishment kepada unit/individu dengan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu komponen penilaian	Telah dibuat Nota Dinas kepada unit kerja yang bersangkutan untuk Bersama – sama Menyusun SOP reward dan punishment

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

Pada tahun 2023 LKJiP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah disusun, guna meningkatkan kinerja dan menyelesaikan isu strategis yang belum terselesaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa di masa mendatang maka rekomendasi atas LKJiP Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan akses layanan Pendidikan maka diperlukan penambahan daya tampung pada Satuan Pendidikan dan/atau melalui perluasan inovasi layanan Pendidikan, antara lain melalui kelas virtual maupun kelas jauh dengan tetap mempertimbangkan sinergi dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Melakukan peningkatan sarpras khususnya rehabilitasi sarpras dengan kondisi rusak berat dan rusak sedang, dan sekaligus penambahan sarpras pendukung yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serapan lulusan di pasar kerja.
4. Penguatan implementasi Merdeka Belajar melalui intervensi Rapor Pendidikan Daerah dan/atau Rapor Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan.
5. Peningkatan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan melalui jalur prioritas pendidikan, khususnya sinergi penanganan ATS.

Terhadap rekomendasi di atas maka pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- 1) Dalam perluasan akses Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melakukan inovasi yaitu adanya kelas virtual. Kelas virtual adalah model layanan pembelajaran regular yang diselenggarakan oleh SMA dalam bentuk kelas khusus yang terstruktur dan terukur bagi anak usia sekolah menengah yang mengalami keterbatasan dan/atau hambatan tertentu dengan media pembelajaran berbasis TIK.

Sejak tahun 2020 Jumlah Kelas Virtual sebanyak 3 kelas Yaitu SMAN 3 Brebes dan SMAN 1 Kemusu, sedangkan kelas Jauh sebanyak 4 Sekolah yaitu SMAN 1 Karangnongko Klaten, SMAN 1 Gebog Kudus, SMAN 1 Mojotengah Wonosobo, serta SMAN 1 Ajibarang.

- 2) Peningkatan sarpras pendidikan pada tahun 2024 telah dilakukan baik melalui dana APBN dan APBD. Tahun 2024 jumlah sarpras yang bersumber dari APBN yaitu dalam bentuk DAK Fisik sebesar Rp 261.971.741.000
- 3) Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serapan lulusan di pasar kerja yaitu dengan melakukan penguatan kerja sama SMK dan Industri melalui penyelarasan kurikulum SMK bersama industri, *upskilling/reskilling* Kelas Industri, melalui program magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK di inudstri, meningkatkan aksestabilitas lulusan di industri.
- 4) Sebagai Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penguatan implementasi Merdeka Belajar melalui intervensi Rapor Pendidikan Daerah dan/atau Rapor Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan yaitu melalui kegiatan sosialisasi asesmen nasional yang dilakukan secara daring, Adapun kegiatan ini dilakukan dengan memaparkan hasil evaluasi asesmen tahun sebelumnya serta persiapan asesmen nasional tahun berjalan.
- 5) Peningkatan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan melalui jalur prioritas pendidikan, khususnya sinergi penanganan ATS dilakukan dengan pendataan ATS khususnya pendatan di daerah miskin yang merupakan desa binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Termasuk dalam penanganan ATS adalah adanya peran serta masyarakat antara lain dilakukan oleh PT. Astra Internasional melalui pemberian bantuan Pendidikan, bersama Yayasan Barong (kelompok flantropis) melalui pembelajaran yang teritegrasi dengan Lembaga Pendidikan Non Formal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2024 - 2025 direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan “Mewujudkan Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lesatri” dengan empat sasaran daerah yang harus diwujudkan yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian yang tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang dinamis

Berdasarkan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 - 2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan sasaran daerah, terutama pada sasaran ke 2 yaitu **“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif”**.

Sasaran daerah ke 2 selaras dengan tujuan yang akan di capai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif;
2. Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Urusan Pendidikan mendukung pencapaian sasaran daerah Provinsi Jawa Tengah yang ke 2 Jawa Tengah yaitu **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif**. Pencapaian sasaran daerah tersebut dituangkan ke dalam sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: (1) Meningkatnya akses pemerataan pendidikan (2) Meningkatnya mutu pendidikan (3) Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun (4) Meningkatnya pelestarian budaya (5) Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan (6) Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan (7) Meningkatnya



kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah (8) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Adapun tujuan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta target kinerjanya di tuangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif			Rata-rata Lama Sekolah	8,08	8,14	8,20
				Harapan Lama Sekolah	12,94	12,96	12,98
		1.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	82,92	83,29	83,60
		1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85,44	85,94	86,44
				Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	66,08	67,25	68,42
		1.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70,93	70,97	71,02
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat			Angka Melek Budaya	52,32	53,82	55,32
		2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	15,89	16,89	17,89
			Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	22,44	23,44	24,44



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	28,23	31,70	35,17
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	74,57	75,07	75,57
		3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,21	3,28	3,45
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,20	3,25	3,30

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,08
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94
		1.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	82,92
		1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85,44
				Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	66,08



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024
1	2	3		4	5	6
		1.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70,93
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat			Angka Melek Budaya	%	52,32
		2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	15,89
			Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	22,44
			Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	28,23
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74,57
		3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,21
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,20

Tabel 2.3
Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	1. Meningkatkan akses perluasan pemerataan pendidikan SMA, SMK dan SLB 2. Meningkatkan pengendalian penyelenggaraan pendidikan 3. Meningkatkan cakupan pemerataan guru dan	Perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
	Meningkatnya mutu pendidikan	ketenagapendidikan SMA, SMK dan SLB 1. Meningkatkan pengembangan pendidikan kartakter siswa 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan SMA, SMK, SLB	Peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Menurunkan angka putus sekolah SMA, SMK dan SLB	Cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi)
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Meningkatnya pelestarian budaya	1. Meningkatkan tata kelola pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 2. Perluasan ruang ekspresi berkesenian masyarakat	Mengembangkan Ekosistem pelindungan obyek pemajuan kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Meningkatkan tata kelola pelestarian Cagar Budaya (CB) 2. Meningkatkan ragam inovasi display koleksi	Mengembangkan Ekosistem pelindungan obyek Cagar Budaya
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	1. Meningkatkan Kompetensi SDM Kebudayaan; 2. Meningkatkan kapasitas lembaga kebudayaan	Mengembangkan Ekosistem pelindungan SDM dan lembaga kebudayaan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.997.335.326.000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.549.897.000
	Administrasi Keuangan	4.838.059.886.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.446.335.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.290.020.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	591.500.000



No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.207.609.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.828.895.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.036.028.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.585.674.796.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.280.935.780.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.120.514.569.000
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	184.224.447.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	731.080.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	586.220.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	144.860.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	746.290.000
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	630.350.000
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	115.940.000
5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	341.362.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.108.042.000
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.395.290.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.712.752.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.960.940.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.960.940.000
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	468.800.000
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	468.800.000
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	261.040.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	443.045.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.265.120.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara



penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah pada awal tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 10 program yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Namun di bulan November 2024 terdapat anggaran perubahan yang mengakibatkan terjadi beberapa perubahan pada target dan anggaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sehingga disusunlah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 antara Kepala Dinas dengan Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria keberhasilan Perjanjian Kinerja ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator *outcome* terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	52,32
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	15,89
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	22,44
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	28,23
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	82,92



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85,44
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	66,08
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70,93
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernakat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74,57
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,18
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,2

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.1		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	65	207.281.945.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.2		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36	18.185.518.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.3		Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,78	714.788.179.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.4		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	50	1.722.517.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.5		Persentase angka putus sekolah SMA	2,3	13.049.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.6		Persentase angka putus sekolah SMK	0,03	14.761.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1.7		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	60	323.328.808.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1.8		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,55	30.356.782.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.9		Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	57,35	1.587.284.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1.10		Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	50,35	1.341.761.447.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1.11		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	10,53	44.917.281.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1.12		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	10	16.511.732.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1.13		Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	86.014.802.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1.14		Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	1.034.317.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1.15		Persentase angka putus sekolah SLB	3,53	2.338.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1.16		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	80,3	1.690.206.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
1.17		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	10	327.910.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1.18		Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	10	635.140.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1.19		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,67	275.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.20		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,9	77.858.839.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.21		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,54	620.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.22		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,59	1.899.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.23		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	281.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.24		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,11	45.014.587.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.25		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,87	230.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.26		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,8	59.767.407.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.27		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	75,57	1.050.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.28		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,69	1.389.883.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.29		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,25	202.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.30		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	69,8	39.689.196.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.31		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,92	280.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.32		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,7	57.823.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.33		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	93,71	1.432.484.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.34		APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	79,86	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.35		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	90	262.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.36		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	90	63.370.916.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.37		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,74	217.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.38		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,55	37.939.701.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.39		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,83	850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.40		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,11	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.41		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,2	232.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.42		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,12	58.078.890.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.43		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,22	234.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.44		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79	93.100.985.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.45		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,59	2.372.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.46		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	77,81	970.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.47		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	28,57	213.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.48		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	84,74	65.454.555.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.49		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	87,73	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.50		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	3,63	258.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.51		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	44,94	38.004.677.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.52		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	1,96	275.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.53		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	80	63.055.741.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.54		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.55		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,25	650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.56		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,52	241.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.57		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79	46.961.197.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
2.1		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,06	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
2.2		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,22	50.370.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.3		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,27	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.4		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	81,77	74.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.5		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,34	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.6		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,49	37.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.7		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	88,83	55.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
2.8		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,03	47.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
					CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2.9		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	85,85	57.690.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.10		Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,21	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.11		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,27	50.570.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.12		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,3	46.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2.13		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,06	52.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3	PROGRAM ENDIDIK DAN ENAGA KEPENDIDIKAN				
3.1		Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	76,2	341.362.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
4.1		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	15	134.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
4.2		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	93,93	110.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
4.3		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
4.4		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
4.5		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	40.370.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
4.6		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
4.7		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	10	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
4.8		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	20	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
4.9		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
4.10		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
4.11		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
4.12		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	25	45.620.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
4.13		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	25	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
4.14		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	28.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
4.15		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	22.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
4.16		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
5.1		Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	19,17	1.109.112.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
5.2		Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	23,76	2.255.440.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
5.3		Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	47,61	139.850.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
5.4		Persentase cakupan pelestarian seni	100	2.603.640.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
6.1		Tingkat partisipasi seni tradisi	8,89	22.960.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
7.1		Persentase akses literasi sejarah	52,9	468.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
8.1		Persentase cagar budaya berperingkat nasional	12,71	519.484.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
8.2		Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	25,13	184.601.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
9.1		Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,85	2.265.120.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
10.1		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	68.549.897.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
10.2		Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	4.901.689.193.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
10.3		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.721.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
10.4		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	3.411.485.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
10.5		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.567.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
10.6		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.336.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
10.7		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.152.060.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II



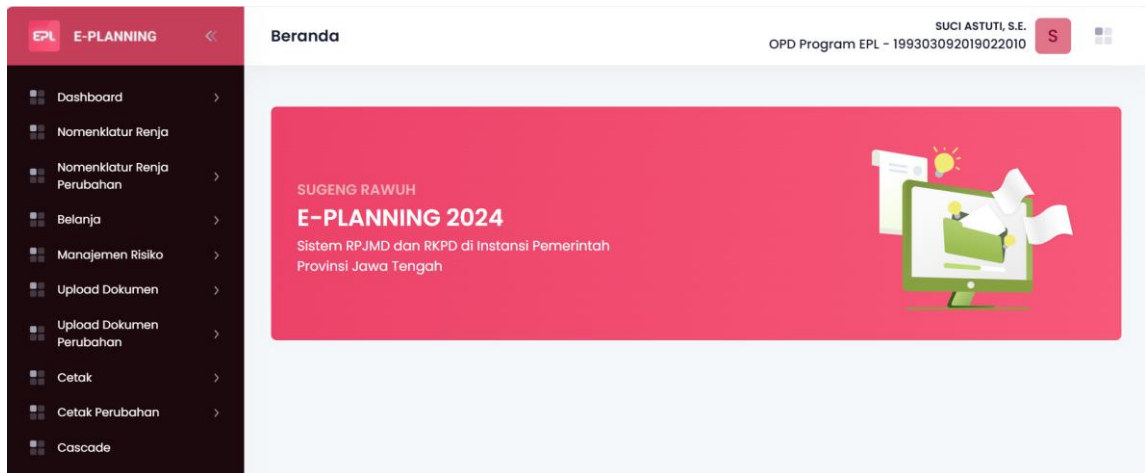
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (RP)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
10.8		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.508.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
10.9		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.496.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
10.10		Persentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.543.892.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
10.11		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.363.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
10.12		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.531.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
10.13		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.264.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
10.14		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.147.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
10.15		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.139.660.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
10.16		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.698.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
10.17		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.914.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
10.18		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.300.399.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

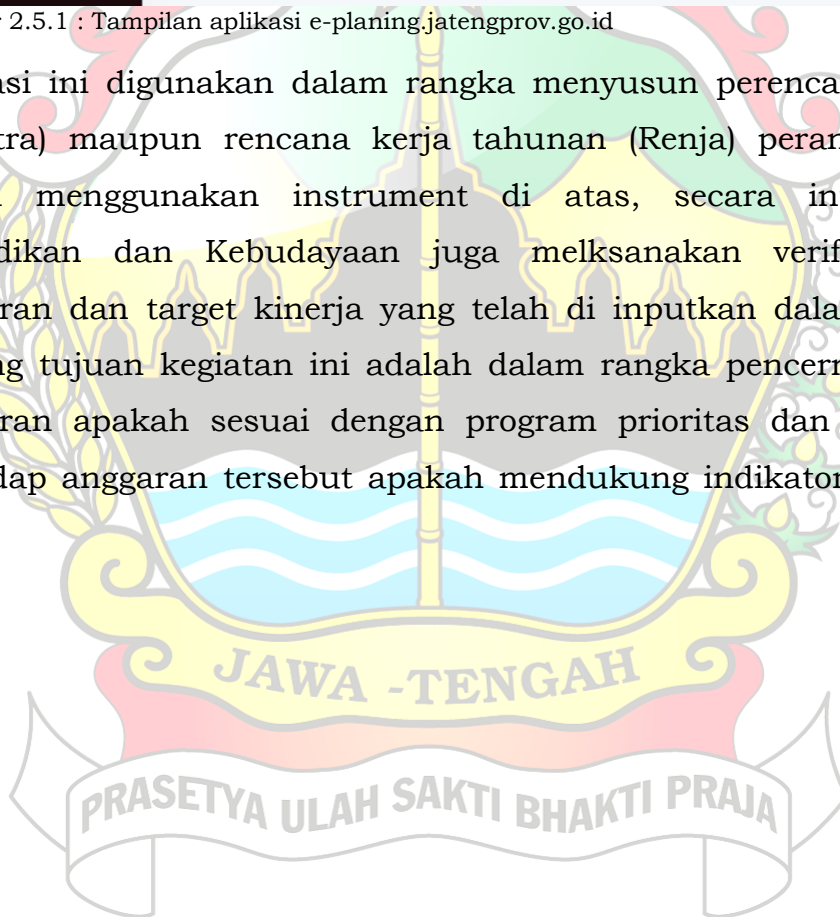
memanfaatkan aplikasi GRMS Provinsi Jawa Tengah, mulai dari tahap perencanaan dan evaluasi. Aplikasi yang mendukung dalam penerapan SAKIP antara lain :

a. *e-planning*

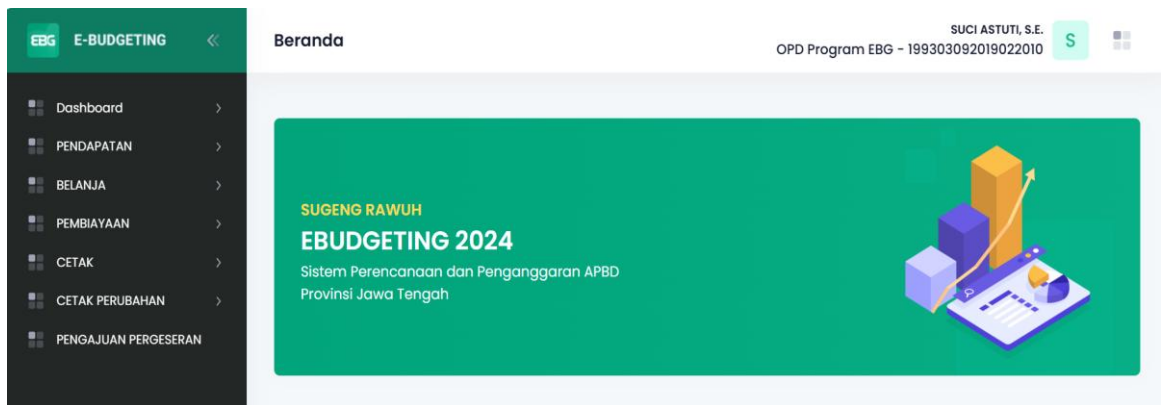


Gambar 2.5.1 : Tampilan aplikasi e-planing.jatengprov.go.id

Aplikasi ini digunakan dalam rangka menyusun perencanaan strategis (Renstra) maupun rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah. Selain menggunakan instrument di atas, secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan verifikasi usulan anggaran dan target kinerja yang telah di inputkan dalam aplikasi e-planing tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pencermatan usulan anggaran apakah sesuai dengan program prioritas dan pencermatan terhadap anggaran tersebut apakah mendukung indikator kinerja atau tidak.



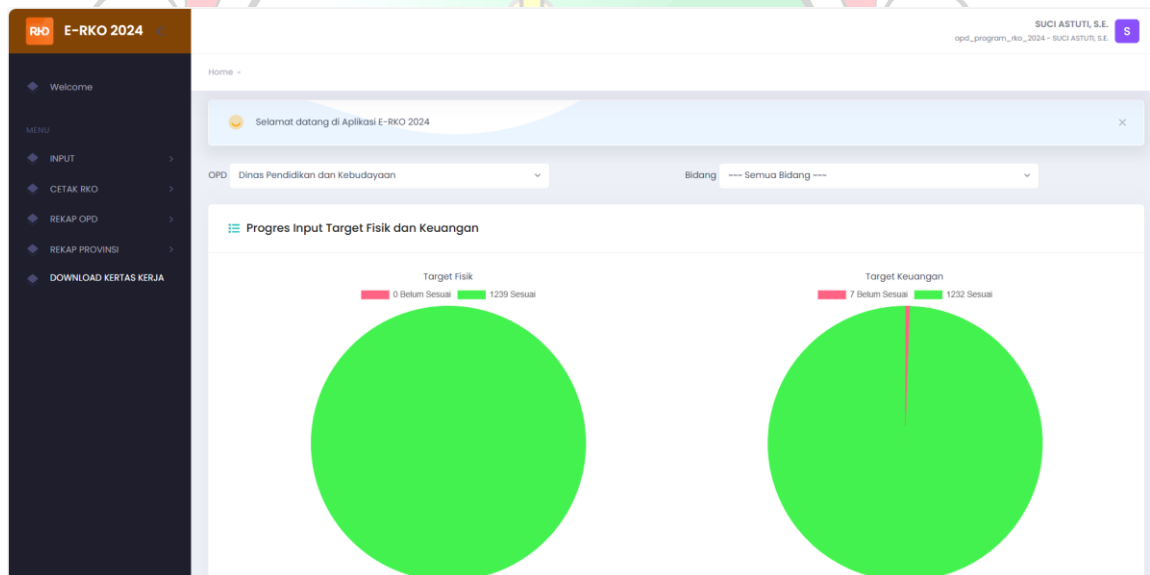
b. e-budgeting



Gambar 2.5.2 : Tampilan aplikasi e-budgeting.jatengprov.go.id

Aplikasi ini digunakan untuk menyusun rincian anggaran secara lebih detail sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan di masing – masing sub kegiatan.

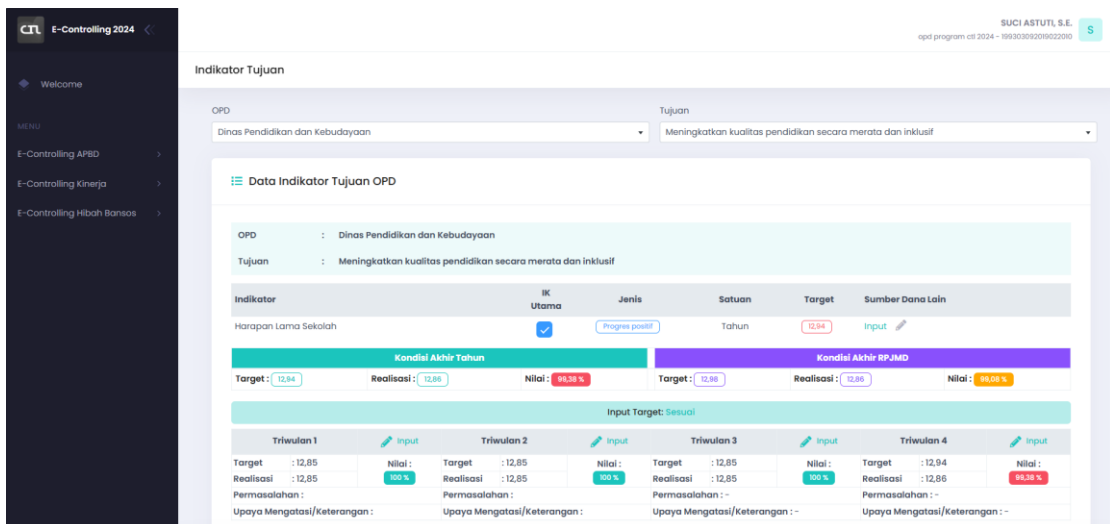
c. e-RKO



Gambar 2.5.3 : Tampilan aplikasi e-RKO.jateng.go.id

Aplikasi ini digunakan untuk menyusun jadwal rencana aksi per sub kegiatan.

d. e-controlling.



Gambar 2.5.4 : Tampilan aplikasi e-controlling.jatengprov.go.id

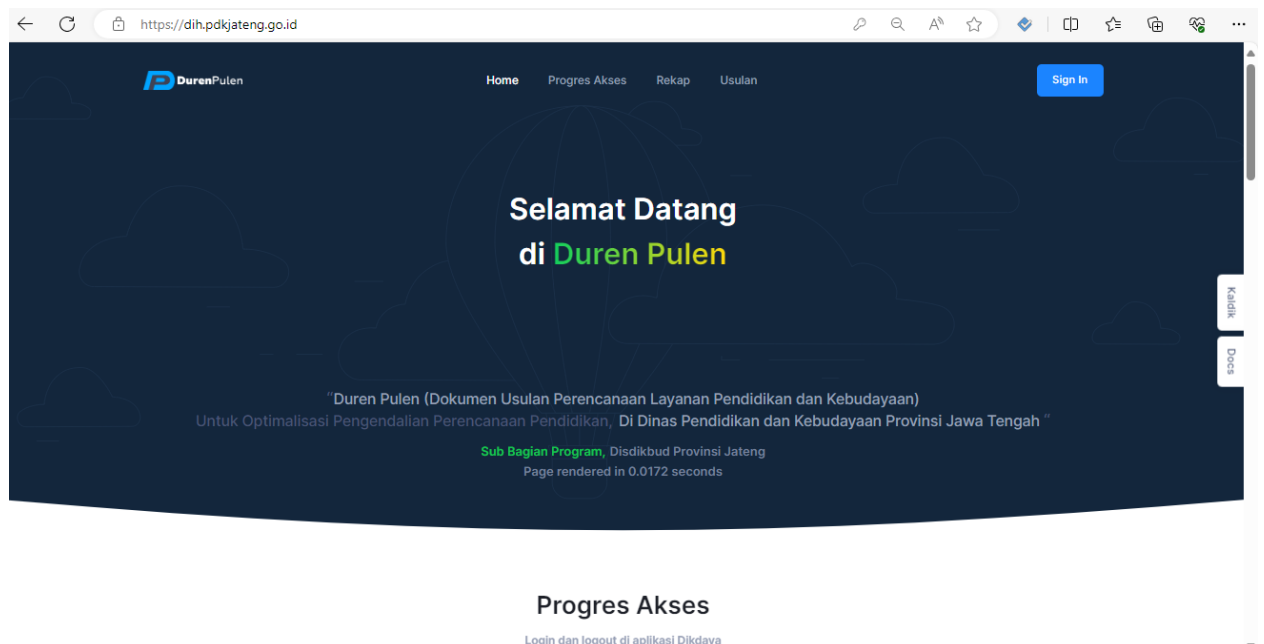
Aplikasi ini digunakan untuk pengendalian anggaran yang dievaluasi setiap bulan serta indikator kinerja yang dievaluasi setiap triwulan. Selain menggunakan instrument di atas, secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Desk Capaian Indikator Kinerja Triwulan II dan Triwulan IV. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja yang telah di inputkan dalam aplikasi econtrolling diyakini kebenarannya. Melalui desk indikator kinerja masing – masing unit kerja bisa menyajikan data dukung dari masing – masing capaian kinerja yang telah diinput dalam aplikasi e-controlling.

Selain aplikasi dari GRMS Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai aplikasi yang dikembangkan oleh Disdikbud dalam menunjang kinerja antara lain :

- a. Duren Pulen (Dokumen Usulan Perencanaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan)

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menampung usulan perencanaan baik usulan anggaran maupun usulan kinerja, aplikasi duren pulen dapat diakses melalui <https://dih.pdkjateng.go.id/>. Usulan yang telah masuk Duren Pulen nantinya akan menjadi bahan untuk input pada aplikasi E-Planing Provinsi Jawa Tengah.

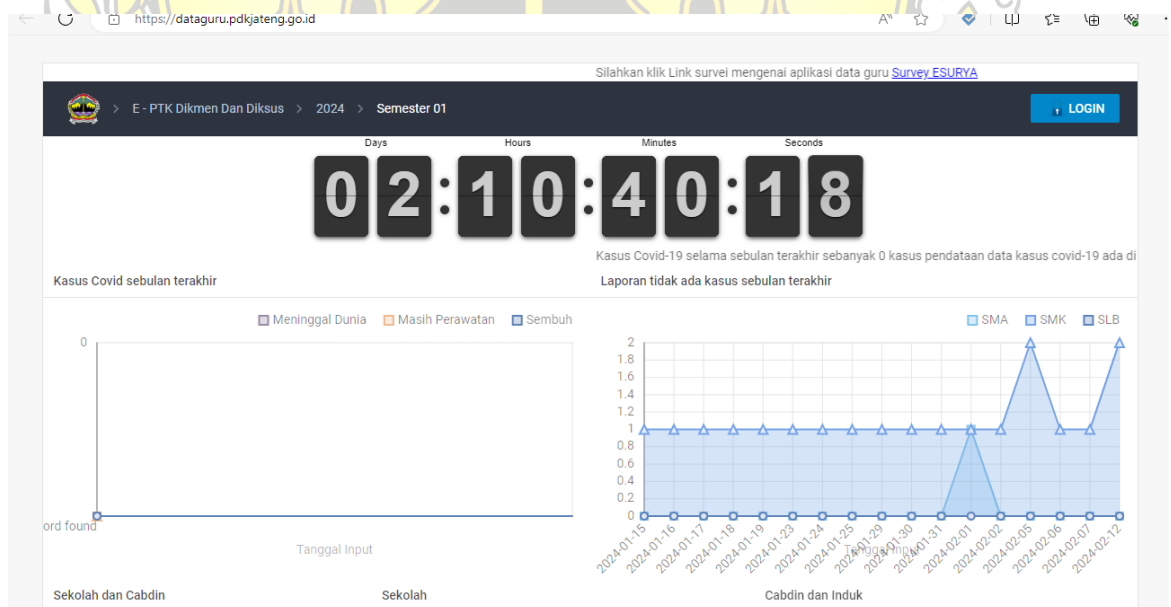
Berikut tampilan dari aplikasi dueren pulen



Gambar 2.5.5 : Tampilan aplikasi duren pulen

b. E-Data guru

Aplikasi ini digunakan untuk verval pencairan TPG (Tambahan Pendapatan Guru) dan Tamsil (Tambahan Penghasilan), adapapun aplikasi ini dapat di akses melalui <https://dataguru.pdkjateng.go.id/> Berikut tampilan aplikasi data guru sebagai berikut :



Gambar 2.5.6 : Tampilan aplikasi data guru.pdkjateng.go.id

c. E-GTT/PTT

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pendataan gtt dan ptt jenjang sma, smk, dan dikus serta penghitungan pembayaran gtt dan ptt setiap bulannya. Data GTT/PTT yang ada di aplikasi ini akan di gunakan sebagai dasar pemberian BOP SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://dataguru.pdkjateng.go.id/gttptt/>



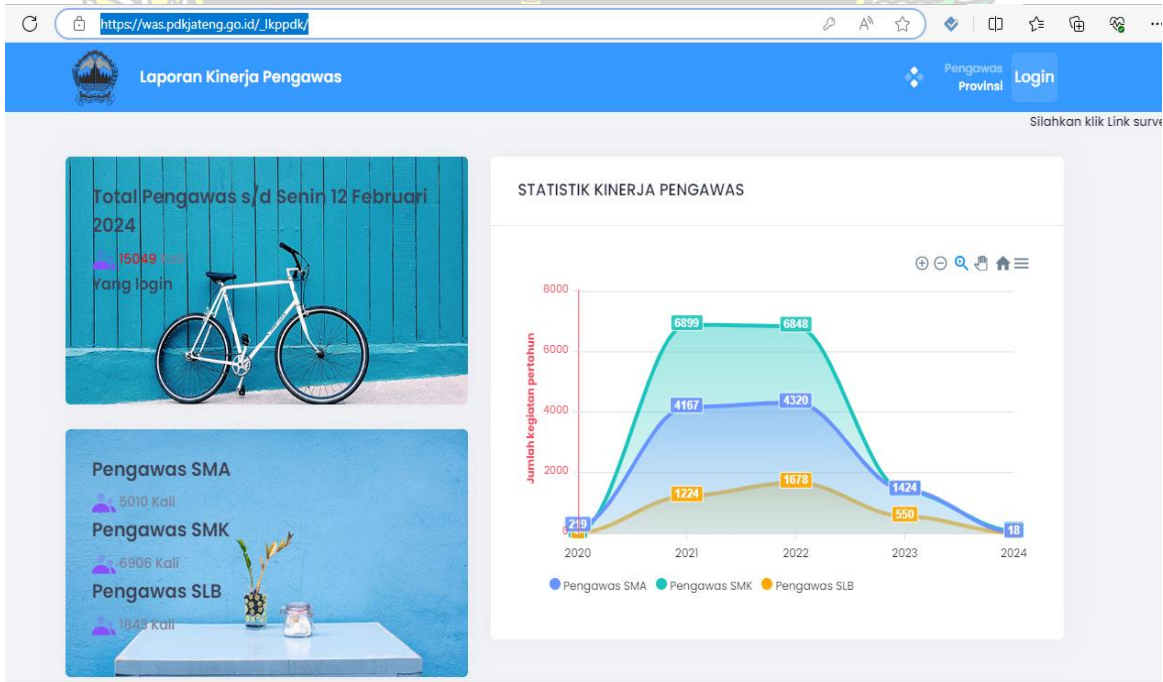
Rekap Data Guru Tidak Tetap(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap(PTT)

N	Kabupaten/Kota	PPPK	Guru Tidak Tetap(GTT)											
			APBD		PSM		BOS		BOP		PLA		Lainnya	
			≥ 24 Jam	< 24 Jam	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jam	< 24 Jam	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jar	< 24 Jar
1	Kota Semarang	6	107	7	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0
2	Kabupaten Semarang	0	89	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Kabupaten Kendal	0	75	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Kabupaten Grobogan	11	76	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
5	Kabupaten Demak	0	123	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Kota Salatiga	0	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Pati	0	106	31	0	0	0	0	3	1	0	0	1	5
8	Kabupaten Kudus	0	69	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Jepara	0	131	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Rembang	0	73	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
11	Kabupaten Blora	0	63	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
12	Kota Surakarta	4	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
13	Kabupaten Boyolali	0	113	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
14	Kabupaten Klaten	0	123	18	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
15	Kabupaten Sukoharjo	0	58	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
16	Kabupaten Wonogiri	0	109	17	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2

Gambar 2.5.7 : Tampilan aplikasi e-gtpttt.pdkjateng.go.id

d. Laporan Kinerja Pengawas (LKP)

Merupakan Sistem informasi Laporan Kinerja Pegawai dan Pengawas di dinas pendidikan dan kebudayaan. Aplikasi ini mempermudah dalam menghimpun laporan kinerja yang telah dibuat oleh pengawas sekolah di masing – masing wilayah tempat kedudukan. Aplikasi ini dapat di akses melalui https://was.pdkjateng.go.id/_lkppdk/. Adapun tampilan aplikasi sperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.5.8 : Tampilan aplikasi LKP (was.pdkjateng.go.id)



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 - 100%;
- c. Cukup : 65 - 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,00%.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	52,32	52,61	100,55 %	55,32
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	15,89	17,62	110,89 %	17,89
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar	Persentase cagar budaya dan objek	%	22,44	23,45	104,50 %	24,44



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	pemajuan budaya yang dilayankan					
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	28,23	28,25	100,07 %	35,17
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,02	99,26%	8,20
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	12,86	99,38 %	12,98
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	82,92	84,08	101,40 %	83,60
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85,44	69,26	81,06 %	86,44
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	66,08	69,72	105,51 %	68,42
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70,93	71,60	100,94 %	71,02
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74,57	63,17	84,71 %	75,57
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,18	3,01	94,65 %	3,45
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,2	3,31	103,44 %	3,30

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dinas Pendidikan mempunyai 3 Tujuan dengan 4 indikator, indikator tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masuk dalam kategori **cukup** yaitu indicator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) dengan capaian sebesar **84,71%** , indicator kinerja dengan kategori **baik** yaitu Rata – Rata



Lama Sekolah dengan capaian sebesar 99,26% dan Harapan Lama Sekolah dengan capaian sebesar 99,38% sedangkan indikator kinerja yang masuk kategori **sangat baik** yaitu indikator Angka Melek Budaya dengan Tingkat capaian sebesar 100,55%.

Indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari total 9 indikator sasaran dengan rata – rata capaiannya masuk kategori **sangat baik** meskipun ada 2 indikator yang belum tercapai yaitu indikator Nilai karakter siswa sekolah menengah dan Indeks Manajemen Risiko. Nilai karakter siswa sekolah menengah belum tercapai dikarenakan Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah, sedangkan inikator Indeks Manajemen Risiko belum tercapai dikarenakan Masih rendahnya manajemen perubahan dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	52,32	52,61	100,55	Sangat Baik	E-Controlling
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,08	8,02	99,26	Baik	E-Controlling
		Harapan Lama Sekolah	12,94	12,86	99,38	Baik	E-Controlling
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	74,57	63,17	84,71	Cukup	E-Controlling

2. Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2024.

Tahun 2019 – 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengalami 2 periode renstra yaitu periode Renstra 2018 – 2023 dan Renstra 2014 – 2026. Dalam periode rentra tersebut indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa

perubahan karena terdapat beberapa indikator setelah dievaluasi sudah tidak sesuai atau kurang mengukur outcome dari program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun ada satu indikator sasaran yang masing digunakan pada renstra periode 2024 – 2026 yaitu indikator APK SMA/SMK/SLB. Pada tahun 2019 dan 2020 APK SMA/SMK/SLB telah mencapai target, sedangkan capaian tahun 2021 – 2023 belum mencapai target dikarenakan masih terdapat anak usia sekolah pada daerah tertentu bersekolah di luar wilayah kabupaten/kota karena mengikuti kepindahan orang tua bekerja Anak usia sekolah menengah bersekolah di madrasah atau mengikuti program kejar paket C . Sedangkan pada tahun 2024 APK SMA,SMK,SLB mencapai target dengan capaian 101,4% Adapun hal – hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yaitu melalui pemberian pembiayaan Pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Tahun 2024 - 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 tujuan dengan 4 indikator, capaian indikator tujuan 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Angka Melek Budaya dengan capaian kinerja sebesar 100,55. Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dengan melakukan pembinaan kesenian dan peletarian kesenian tradisional serta mengenalkan kebudayaan dan kesenian dalam Masyarakat seperti membuka ruang ekspresi budaya Masyarakat.
- b. Rata – rata lama sekolah dengan capaian kinerja sebesar 99,26 % dan Harapan lama sekolah dengan capaian 99,38%. RLS dan HLS merupakan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari segi dimensi pengetahuan. Kedua indikator tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan RLS dan HLS menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- c. Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 84,71%, indeks reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tercapai salah satunya yaitu dikarenakan belum menyusun rencana tindak Agen Perubahan dan melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 serta belum melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 ada 8 dengan jumlah indikator sasaran yaitu sebanyak 9 indikator kinerja. Capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Persentase karya budaya berperingkat nasional dengan capaian sebesar 110,89% dikarenakan adanya kenaikan jumlah arisan budaya tak benda yang ditetapkan nasional;
- b. Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan dengan capaian kinerja sebesar 104,5%
- c. Persentase SDM dan Lembaga kebudayaan yang dilayani dengan capaian kinerja sebesar 100,07%
- d. APK SMA, SMK, SLB dengan capaian kinerja sebesar 101,4% adapun hal – hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yaitu melalui pemberian pembiayaan Pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Nilai karakter siswa dengan capaian kinerja sebesar 81,06% salah satu faktornya yaitu masih rendahnya Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah;
- f. Rata – rata literasi dan numerasi sekolah menengah dengan capaian kinerja sebesar 105,51% dikarenakan meningkatnya kualitas pembelajaran siswa, Adapun intervensi kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pembiayaan yang terjangkau (pembiayaan Pendidikan bebas pungutan) sehingga siswa lebih fokus dalam proses belajar;
- g. Angka Partisipasi sekolah usia 16 – 18 th dengan capaian kinerja sebesar 100,94% dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan terkait pembiayaan Pendidikan sehingga partisipasi Masyarakat untuk mengenyam Pendidikan meningkat;

- h. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian kinerja sebesar 94,71% belum tercapai salah satu factor yang mempengaruhi antara lain belum teridentifikasinya resiko strategis terkait dengan pemertaan akses Pendidikan salah satunya yaitu relokasi/mutase guru PPPK;
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 103,44% telah tercapai dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk rincian target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.





Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya																52,32	52,61	100,55
1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional																15,89	17,62	110,89
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan																22,44	23,45	104,50
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani																28,23	28,25	100,07
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah																8,08	8,02	99,26
		Harapan Lama Sekolah																12,94	12,86	99,38
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA/SMK/SLB	47.04	49.65	105.55	47.36	83.99	177.34	84,30	74,15	87,96	84,80	81,84	96,51	85.1	83.65	98.29	82,92	84,08	101,40
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah																85,44	69,26	81,06



NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah																66,08	69,72	105,51
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th																70,93	71,60	100,94
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)																74,57	63,17	84,71
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko																3,18	3,01	94,65
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat																3,2	3,31	103,44





- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	52,61	55,32	95,10
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	17,62	17,89	98,49
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	23,45	24,44	95,95
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	28,25	35,17	80,32
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,02	8,14	98,53
		Harapan Lama Sekolah	12,86	12,98	99,08
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	84,08	83,60	100,57
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	69,26	86,44	80,12
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	69,72	68,42	101,90
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	71,60	71,02	100,82
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	63,17	75,57	83,59
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	3,45	87,25
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,30	100,30

- 4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.



Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	52,32	52,61	100,55		
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	15,89	17,62	110,89	adanya kenaikan jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan nasional	
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	22,44	23,45	104,50		
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	28,23	28,25	100,07		
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,08	8,02	99,26		
		Harapan Lama Sekolah	12,94	12,86	99,38		
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	82,92	84,08	101,40	Intervensi program melalui pemberian pembiayaan pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85,44	69,26	81,06	Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah	Pendampingan dan sosialisasi kepada satuan Pendidikan khususnya bagi Tim Penanganan Tindak Kekerasan yang ada pada satuan pendidikan
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	66,08	69,72	105,51	meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, Adapun intervensi kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pembiayaan yang terjangkau (pembiayaan Pendidikan bebas pungutan) sehingga siswa	



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						lebih focus dalam proses belajar	
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70,93	71,60	100,94	dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan terkait pembiayaan Pendidikan sehingga partisipasi Masyarakat untuk mengenyam Pendidikan meningkat	
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	74,57	63,17	84,71	Dikarenakan belum menyusun rencana tindak Agen Perubahan dan melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 serta belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Pembentukan tim kerja RB dan perbaikan area penataan tata laksana yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,18	3,01	94,65	Belum tercapai salah satu factor yang mempengaruhi antara lain belum teridentifikasinya risiko strategis terkait dengan pemertaan akses Pendidikan salah satunya yaitu relokasi/mutase guru PPPK	Melakukan identifikasi serta penilaian risiko mulai dari risiko startegis d sampai dengan operasional dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengelola Risiko
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,31	103,44		

5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa sasaran dengan tingkat efisiensinya lebih dari 10% diantaranya adalah sebagai berikut: :

- Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani terjadi efisiensi sebesar 16% hal ini dikarenakan terdapat belanja hibah kebudayaan yang tidak tersalur sepenuhnya dikarenakan lembaga penerima hibah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam juknis penerima hibah;
- Nilai karakter siswa sekolah menengah terjadi efisiensi sebesar 11,06% dikarenakan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus terdapat efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat karena adanya perubahan skema kegiatan yang semula direncanakan luring dirubah menjadi daring.

Untuk lebih jelas capaian realisasi kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	52,32	52,61	100,55	32.506.987.000,00	28.610.337.319	88,01	11,99
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	15,89	17,62	110,89	6.497.356.000	6.348.460.741	97,71	2,29
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	22,44	23,45	104,50	2.908.841.000	2.856.076.478	98,19	1,81



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	28,23	28,25	100,07	23.100.790.000	19.405.800.100	84,00	16,00
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,08	8,02	99,26	30.149.450.000	28.876.667.880	95,78	4,22
		Harapan Lama Sekolah	12,94	12,86	99,38	3.557.344.078.000	3.525.444.937.568	99,10	0,90
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	82,92	84,08	101,40	716.325.558.000	712.325.551.081	99,44	0,56
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85,44	69,26	81,06	731.080.000	650.240.078	88,94	11,06
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	66,08	69,72	105,51	2.840.287.440.000	2.812.469.146.409	99,02	0,98
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70,93	71,60	100,94	30.149.450.000	28.876.667.880	95,78	4,22
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	74,57	63,17	84,71	4.997.335.326.000	4.912.538.253.889	98,30	1,70
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,18	3,01	94,65	68.549.897.000	62.042.898.947	90,51	9,49
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,31	103,44	4.928.785.429.000	4.850.495.354.942	98,41	1,59



6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

**Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	99,26				
		Harapan Lama Sekolah	99,38				
1.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	101,40%				
1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	105,51%				
		Nilai karakter siswa sekolah menengah	81,06%				
1.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	100,94%				
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	133,4	
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	3,17	
					Persentase SMA dengan nilai literasi dan	109,77	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					numerasi mencapai kompetensi minimum		
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	23	
					Persentase angka putus sekolah SMA	209,09	
					Persentase angka putus sekolah SMK	0,97	
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	127,72	
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	190,91	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	35,19	
					Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	98,59	
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	171,79	
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	8,1	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	248,2	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	112,82	
					Persentase angka putus sekolah SLB	78,62	
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	100	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	100	
					Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	100	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	791,62	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	9.593,33	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	93,77	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	92,35	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	374	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	157,69	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	460,28	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	100,87	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	103,9	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	292,21	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	115,2	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	97,88	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	778,13	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	128,32	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,06	
					APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	101,16	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	7,02	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	88,69	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	230,66	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	108,81	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	159,36	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	102,62	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	849,09	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	125,51	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	383,85	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	111,57	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	148,78	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	114,43	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	19,11	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	90,88	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	90,57	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	63,36	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	167,6	
					Persentase capaian prestasi peserta didik	307,65	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					SMA, SMK dan SLB CABDIN XII		
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	100,68	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	97,75	
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	101,43	
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	262,3	
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	107,48	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	99,38	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	98,65	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	99,44	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	99,01	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	99,83	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	99,35	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	94,37	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	98,96	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	100,22	
					Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	85,74	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	99,04	
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	99,16	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	98,68	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
					Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	100	
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	637,67	
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	95,54	
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	50	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	333,33	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	10,71	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	25,81	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	148,1	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	416,65	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	50	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan	100	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII		
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	0	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	44	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	21,64	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	247,06	
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	57,44	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	22,58	
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	100,55				
2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	110,89%				
2.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	104,50%				
2.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	100,07%				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
					Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	115,18	
					Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	100	
					Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	100	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase cakupan pelestarian seni	100	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
					Tingkat partisipasi seni tradisi	100	
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
					Persentase akses literasi sejarah	100	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
					Persentase cagar budaya berperingkat nasional	103,54	
					Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	102,15	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
					Nilai survey kepuasan pengunjung museum	100,26	
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngakat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	84,71%				
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	94,65%				
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,44%				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	

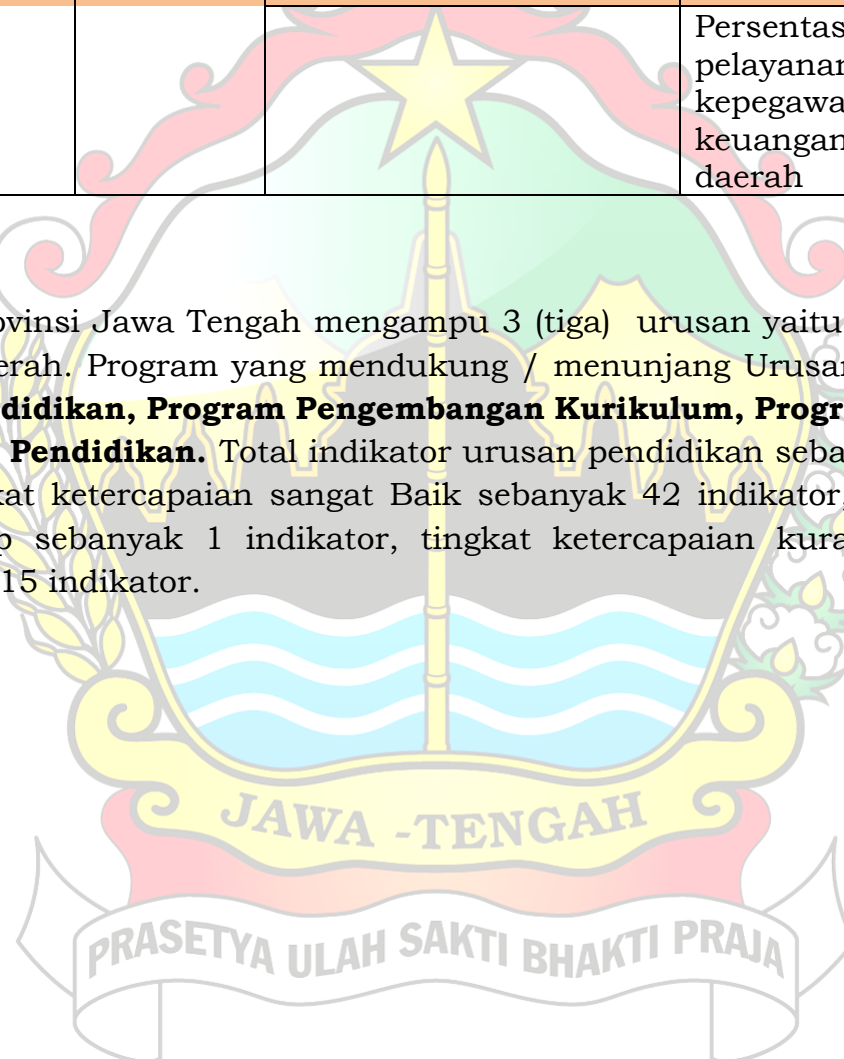


NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					keuangan perangkat daerah		
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) urusan yaitu urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan penunjang pemerintah daerah. Program yang mendukung / menunjang Urusan pendidikan terdiri dari empat program, diantaranya **Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**. Total indikator urusan pendidikan sebanyak 87 indikator dengan rincian tingkat capaian adalah sebagai berikut: Tingkat ketercapaian sangat Baik sebanyak 42 indikator, tingkat ketercapaian baik sebanyak 27 indikator, tingkat ketercapaian cukup sebanyak 1 indikator, tingkat ketercapaian kurang sebanyak 2 indikator dan tingkat ketercapaian Sangat Kurang sebanyak 15 indikator.



Dalam mewujudkan pembangunan urusan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp3.587.493.528.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

Program Pengelolaan Pendidikan didukung anggaran Rp3.585.674.796.000,00 dengan realisasi fisik 99,97% dan keuangan 99,08%. Program ini memiliki 57 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 36 indikator sangat Baik, 12 Baik, 1 cukup, 1 kurang dan 7 sangat kurang. Adanya tingkat capaian indikator rendah dan sangat rendah dikarenakan masih terdapat peserta didik yang tidak melanjutkan/menuntaskan pendidikan selain itu indikator yang capainya sangat rendah salah satunya adalah capaian prestasi hal ini dikarenakan persebaran prestasi di setiap wilayah kurang merata antara wilayah perkotaan dengan wilayah pinggiran. Manfaat yang diperoleh dengan adanya program ini adalah meningkatnya partisipasi penduduk dalam hal pendidikan pada satuan pendidikan.

Program Pengembangan Kurikulum didukung alokasi anggaran Rp731.080.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 88,94%. Program ini memiliki 13 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 1 indikator sangat Baik, dan 12 indikator baik. Manfaat yang diperoleh dengan program ini adalah meningkatnya mutu pembelajaran pada satuan pendidikan.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan didukung anggaran Rp341.362.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,76% dengan 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian baik. Manfaat dari Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah meningkatkannya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang selaras dengan paradigma pembelajaran terkini yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan didukung anggaran Rp742.290.000,00 dengan realisasi fisik 86,7% dan keuangan 99,99%. Program ini memiliki 16 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 5 indikator sangat Baik, 2 indikator Baik, 1 indikator kurang dan 8 sangat kurang. Capaian indikator rendah dan sangat rendah dikarenakan usulan perizinan berlokasi pada wilayah yang menjadi prioritas (blank spot). Manfaat dari Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perluasan akses layanan pendidikan.

Urusan kebudayaan terdiri dari lima program, diantaranya **Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman** dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 9 indikator dan tingkat ketercapaian sangat Baik sebanyak 4 indikator dan tingkat ketercapaian Baik sebanyak 5 indikator.

Dalam mewujudkan pembangunan urusan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp32.506.987.000,00 untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

Program Pengembangan Kebudayaan didukung alokasi anggaran Rp6.108.042.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,86%. Program ini terdapat di Bidang Pembinaan Kebudayaan dan Taman Budaya Jawa Tengah. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat baik dan 3 indikator dengan tingkat capaian baik.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya even seni budaya yang diselenggarakan pemerintah provinsi dalam rangka menciptakan ekosistem dan ruang ekspresi bagi masyarakat lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah serta masih lemahnya data dukung pengusulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Upaya yang dilakukan adalah memperbanyak even seni budaya yang dilakukan secara gotong royong dengan kabupaten/kota dan memfasilitasi perekaman video serta kajian akademis bagi kabupaten/kota yang mengusulkan penetapan WBTb.

Manfaat dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah masyarakat pendukung dan pihak yang terlibat dalam pelestarian warisan budaya semakin berkembang, warisan budaya semakin lestari, dan ekosistem kebudayaan menjadi lebih hidup dan berkembang, serta dapat memberikan kesempatan pada masyarakat luas (publik) untuk mendapatkan peningkatan dalam literasi budaya khususnya seni pertunjukkan dan pameran.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional didukung anggaran Rp22.960.940.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 83,91%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian Baik.

Permasalahan yang dihadapi kurangnya regenerasi pelaku seni budaya serta kurangnya sarana dan prasarana berkesenian. Upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitasi pelatihan berkesenian untuk generasi muda serta memberikan sarana dan prasarana bagi pelaku seni dan lembaga seni.

Manfaat dari Program Pengembangan Kesenian Tradisional adalah adanya peningkatan apresiasi kesenian dalam kehidupan masyarakat. Seni dapat mewarnai sendi hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat. Dampak berkelanjutan yang bisa dirasakan adalah ekonomi budaya dalam setiap apresiasi kesenian yang dilakukan, sehingga terwujud masyarakat bahagia dan berkarakter dengan penuh karya. Sadar atau tidak sadar, ruang-ruang berekspresi budaya akan tercipta.

Program Pembinaan Sejarah didukung anggaran Rp468.800.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,91%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat baik.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sumber literasi sejarah dan kurangnya minat generasi muda terhadap literasi sejarah. Upaya yang dilakukan adalah menambah sumber literasi sejarah dan mengadakan lomba karya tulis terkait literasi sejarah.

Manfaat dari Program Pembinaan Sejarah adalah bertambahnya sumber literasi Sejarah dan meningkatnya minat generasi muda terhadap literasi sejarah, sehingga pemahaman nilai-nilai sejarahnya meningkat.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya didukung anggaran Rp704.085.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,16%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat Baik.

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang mengakibatkan upaya pelestarian terhambat. Upaya yang dilakukan adalah menghimbau dan mendorong kabupaten/kota untuk melakukan penetapan Cagar Budaya.

Manfaat yang diperoleh dari Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah meningkatnya ODCB dan/atau Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum melalui penetapan dan pemeringkatan guna memperkuat identitas budaya bangsa.

Program Pengelolaan Permuseuman didukung alokasi anggaran Rp2.265.120.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,95%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian Sangat Baik.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat umum terhadap keberadaan museum serta museum belum



menjadi destinasi utama untuk dikunjungi. Upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan ruang non koleksi sebagai tempat masyarakat berkegiatan seni misalnya pelatihan pedalangan dan pelatihan gamelan.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya program tersebut adalah meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi dan pelestarian koleksi museum.

Urusan penunjang urusan terdiri dari 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, tingkat ketercapaian Baik sebanyak 18 indikator. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian ini adalah adanya peningkatan layanan perangkat daerah dalam memberikan layanan kepegawaian dan pengadministrasian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Realisasi Anggaran

Keterserapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 98,59 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dimana, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 8.617.335.841.000,- adapun realisasinya sebesar Rp. 8.495.470.196.656,-. Besaran alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.617.335.841.000	8.495.470.196.656	98,59
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.997.335.326.000	4.912.538.253.889	98,30
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.549.897.000	62.042.898.947	90,51
	Administrasi Keuangan	4.838.059.886.000	4.762.121.769.652	98,43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.446.335.000	9.906.149.018	94,83
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.290.020.000	20.971.566.304	98,50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	916.656.000	874.533.847	95,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.207.609.000	4.916.285.004	94,41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.828.895.000	43.959.443.128	98,06



No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.036.028.000	7.745.607.989	96,39
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.585.674.796.000	3.552.714.528.914	99,08
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.280.935.780.000	1.268.077.641.445	99,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.120.514.569.000	2.101.789.928.018	99,12
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	184.224.447.000	182.846.959.451	99,25
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	731.080.000	650.240.078	88,94
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	586.220.000	528.928.450	90,23
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	144.860.000	121.311.628	83,74
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	746.290.000	647.024.456	86,70
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	630.350.000	543.683.056	86,25
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	115.940.000	103.341.400	89,13
5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000	309.812.000	90,76
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	341.362.000	309.812.000	90,76
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.108.042.000	5.977.629.885	97,86
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.395.290.000	2.363.115.278	98,66
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.712.752.000	3.614.514.607	97,35
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.960.940.000	19.267.130.100	83,91
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.960.940.000	19.267.130.100	83,91
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	468.800.000	454.301.700	96,91
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	468.800.000	454.301.700	96,91



No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000	669.987.194	95,16
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	261.040.000	250.431.000	95,94
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	443.045.000	419.556.194	94,70
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000	2.241.288.440	98,95
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.265.120.000	2.241.288.440	98,95

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, suatu organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat output tertentu. Disamping itu, dengan adanya efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. Dalam teknis pengukuran, bahwa efisiensi merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan tertentu. Efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Capaian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 sebesar 98,59% atau sebesar Rp 8.495.470.196.656,00. Artinya terdapat silpa sebesar 1,41% atau sebesar Rp121.865.644.344,00. Ketidakterserapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2024 sebagian besar diakibatkan adanya sisa lelang, Silpa BOS dan BOP SMA, SMK, dan SLB, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak selesai atau tidak terlaksana di tahun 2024. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah yaitu pada aktivitas pembuatan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) SKO tidak selesai dilaksanakan dikarenakan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi telah selesai dan disampaikan ke dinas PU, namun aplikasi SIMBG mengalami gangguan sejak awal bulan Desember sampai dengan saat ini yang berakibat SIMBG tidak bisa diakses oleh konsultan penyusun maupun oleh dinas terkait untuk upload data/dokumen guna penerbitan SLF;
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan pada kegiatan Pengelolaan SMK Boarding yaitu beberapa belanja modal tidak terlaksana kerkendala barang belum memenuhi sertifikat kadar TKDN dan belum mendapat rivew dari inspektorat;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II tidak realisasi di belanja alat pemotong kertas karena dilapangan tidak ada produk TKDN sedangkan surat ijin dari sekda menjelaskan bahwa produk

tersebut ada TKDN

4. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN yang belum disalurkan karena masih menunggu juknis dari pusat;
5. Perencanaan Pembangunan USB SMK Negeri Cimanggu yang tidak dilaksanakan karena belum ada kejelasan tanah atau hibah tanah antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Ruang Kelas Sekolah (Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Plupuh Kab Sragen) Pekerjaan dalam satu locus yang sama (SMAN 1 Plupuh), sehingga waktu pelaksanaan harus bergantian; Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
7. Sisa Lelang dari pengadaan seragam siswa miskin sebesar Rp 924.438.450 anggaran semula untuk seragam siswa miskin sebesar Rp 12.822.450.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp11.898.011.550 ;

Sedangkan untuk kegiatan lain seperti sisa belanja gaji dan sisa belanja perjalanan dinas, makan minum, dll merupakan efisiensi belanja karena digunakan sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Inovasi

Inovasi pemerintah di bidang pengembangan pendidikan tanah air terus bergelora. Merdeka belajar diluncurkan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan terutama tekanan psikologis. Merdeka belajar sebagai program baru bagi arah pembelajaran kedepan tidaklah menjadi hal yang berbenturan, bahkan sebaliknya menjadi sebuah kebijakan yang terkolerasi dengan program pendidikan sebelumnya. Menindaklanjuti kebijakan merdeka belajar, Raport Pendidikan diluncurkan dengan tujuan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah. Satuan pendidikan dan dinas menjadikan Raport Pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selaras dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Unggulan Gubernur. Adapun Program Unggulan Gubernur di bidang pendidikan yaitu “Sekolah Tanpa Sekat”. Implementasi dari Sekolah Tanpa Sekat adalah sebagai berikut :

a. SMK Boarding

Didirikan dengan tujuan meningkatkan Angka Partisi Kasar (APK) dan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. SMKN Jateng menggunakan pola boarding dan siswa harus dari keluarga tidak mampu dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Seluruh biaya pendidikan dibebankan dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi Asrama, biaya makan, pakaian seragam, alat tulis dan kelengkapannya dan beberapa biaya lain, dengan kata lain siswa sama sekali tidak

dipungut biaya selama masa pendidikan. Kurikulum yang digunakan menggunakan Kurikulum Reguler dan Kurikulum Berbasis Karakter.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

b. SMK Semi Boarding

SMK Semiboarding merupakan pengembangan dari SMK Boarding. SMK Semiboarding mulai dikelola pada tahun 2022. Salah satu upaya meningkatkan Angka Partisi Kasar (APK) dan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Lokasi SMK Semi Boarding berada di 15 Kabupaten miskin di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyumas. Sampai dengan tahun 2023 SMK Semi Boarding sudah menampung 2 kelas yaitu kelas 10 dan 11



Latihan fisik SMK Semi Boarding di Kabupaten Purworejo (SMKN 1 Purworejo)

c. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah Blank Spot

Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperluas akses pendidikan, dalam pembangunan satuan pendidikan Unit Sekolah Baru mengambil konsep dimana lebih futuristik dan modern. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun 6 Unit

Sekolah Baru dalam rangka perluasan akses pendidikan sekolah tersebut antara lain :

- 1) SMA Negeri 9 Surakarta, tahun 2024 merupakan tahap ke 2 pembangunan USB dan merupakan tahap terakhir dari pembangunan SMAN 9 Surakarta;

Peresmian SMAN 9 Surakarta dan Launching PPDB 2024 (4 Juni 2024)

Peresmian SMAN 9 Surakarta dan Launching PPDB 2024 (4 Juni 2024)



- 2) SMA Negeri 1 Garung Kabupaten Wonosobo merupakan Pembangunan USB tahap 1 dan direncanakan Pembangunan SMAN Garung dalam 3 tahap Dimana akan berakhir di tahun 2026;



- 3) SMA Negeri Tegal Kota Tegal, tahun 2024 merupakan tahap 1 pembangunan SMAN Kota Tegal dan akan direncanakan selesai dalam 3 tahap;



- 4) SMK Negeri Lumbir, tahun 2024 merupakan tahap terakhir Pembangunan SMK N Lumbir
- 5) SMK Negeri Karangjambu, tahun 2024 merupakan tahap awal Pembangunan SMK N Karangjambu, SMKN Karangjambu sebelumnya berdiri di tanah milik pemerintah kabupaten dan pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi mendapatkan hibah tanah dari warga yang dengan sukarela menghibahkan tanahnya untuk membangun tempat Pendidikan, dan akhirnya pada tahun 2024 SMKN Karangjambu direlokasi ke lahan yang lebih luas.



Inovasi yang dilakukan Disdikbud selain Program Sekolah Tanpa Sekat yaitu Gerakat “Ayo Rukun”. Program kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sekolah aman nyaman dan menyenangkan , program ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode ke-25. Adapun yang telah dilakukan Disdikbud dalam program gerakan ayo rukun sbb :

- a. Pembentukan Satgas Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di tingkat Provinsi dan tingkat satuan pendidikan;
- b. Penetapan sekolah piloting
- c. Penguatan komitmen Lintas Pemangku Kepentingan



Launching Program Gerakan Ayo Rukun

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

3.4 Penghargaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 memperoleh penghargaan di tingkat Internasional maupun nasional. Adapun penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Anugrah Merdeka Belajar 2024, kategori transformasi pengelolaan pendidikan. Penghargaan ini dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek RI pada tanggal 5 Juli 2024.



2. SKPD Informatif 2024, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada SKPD sebagai badan publik infromatif. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2024.



3. Apresiasi Gender Champion 2024, penghargaan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perayaan Hari Ibu Nasional yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah;



4. Penghargaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Pelopor kategori Berkembang atas komitmennya dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI dan diberikan tanggal 4 Desember 2024.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja maupun keuangan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Adapun isu strategis pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai implementasi kurikulum merdeka;
2. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan Penyelarasan kurikulum yang adaptif serta implementasi penerapan pendidikan karakter ke dalam pengembangan kurikulum sebagai wujud penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi kompetensi siswa, dan pembinaan kesiswaan.
4. Peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan dengan pengelolaan manajemen sekolah dan pembiayaan sekolah serta pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah (ARKAS, MARKAS, SIPERKASA)
5. Penguatan nilai budaya dan karakter masyarakat melalui pemajuan kebudayaan di masyarakat, internalisasi kurikulum muatan lokal dengan nilai budaya dan karakter, pengelolaan dan pemanfaatan kebudayaan serta pelestarian kesenian tradisional

Dalam rangka penyelesaian isu strategis, Dinas Pendidikan mempunyai 3 Tujuan dengan 4 indikator, indikator tujuan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Masuk dalam kategori **cukup** yaitu indicator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) dengan capaian sebesar **84,71%** , indicator kinerja dengan kategori **baik** yaitu Rata – Rata Lama Sekolah dengan capaian sebesar 99,26% dan Harapan Lama Sekolah dengan capaian sebesar 99,38% sedangkan indicator kinerja yang masuk kategori **sangat baik** yaitu indicator Angka Melek Budaya dengan Tingkat capaian sebesar 100,55%.

Indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari total 9 indikator sasaran dengan rata – rata capaiannya masuk kategori **sangat baik** meskipun ada 2 indikator yang belum tercapai yaitu indikator Nilai karakter siswa sekolah menengah dan Indeks Manajemen Risiko. Nilai karakter siswa sekolah menengah belum tercapai dikarenakan Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah, sedangkan inikator Indeks Manajemen Risiko belum tercapai dikarenakan Masih rendahnya manajemen perubahan dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Analisis terhadap keberhasilan indikator tersebut dikarenakan adanya inovasi – inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian kinerja. Adapun inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian indikator Presentase APK SMA, SMK, SLB inovasi yang telah dilakukan adalah
 - a. Pembangunan USB pada daerah blank spot
 - b. Pemberian hibah pendidikan umum untuk sekolah swasta
 - c. Peningkatan sarpras Pendidikan melalui dana APBD

Hal ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan isu startegis Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Dalam rangka pencapaian indikator Rata – Rata Literasi dan Numerasi sekolah menengah Disdikbud melakukan terobosan yaitu melalui kegiatan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan serta pembinaan minat bakat dan kratifitas siswa;
3. Dalam rangka pencapaian indikator Angka partisipasi sekolah usia 16 -18 tahun inovasi yang telah dilakukan yaitu melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pemberian seragam siswa miskin dal ini dilakukan

dalam rangka pencegahan anak putus sekolah dan menjamin bahwa siswa tercukupi kebutuhan personal pendidikannya;

4. Dalam rangka pencapaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan mempermudah pelayanan di masing – masing Cabang Dinas.

Capaian keunagan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 sebesar 98,59% atau Rp 8.495.470.196.656,00. Artinya terdapat silpa sebesar 1,41% atau sebesar Rp121.865.644.344,00. Ketidakterserapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2024 sebagian besar diakibatkan adanya sisa lelang, Silpa BOS dan BOP SMA, SMK, dan SLB, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak selesai atau tidak terlaksana di tahun 2024. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah yaitu pada aktivitas pembuatan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) SKO tidak selesai dilaksanakan dikarenakan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi telah selesai dan disampaikan ke dinas PU, namun aplikasi SIMBG mengalami gangguan sejak awal bulan Desember sampai dengan saat ini yang berakibat SIMBG tidak bisa diakses oleh konsultan penyusun maupun oleh dinas terkait untuk upload data/dokumen guna penerbitan SLF;
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan pada kegiatan Pengelolaan SMK Boarding yaitu beberapa belanja modal tidak terlaksana kerkendala barang belum memenuhi sertifikat kadar TKDN dan belum mendapat rivew dari inspektorat;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II tidak realisasi di belanja alat pemotong kertas karena dilapangan tidak ada produk TKDN sedangkan surat ijin dari sekda menjelaskan bahwa produk tersebut ada TKDN
4. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN yang belum disalurkan karena masih menunggu juknis dari pusat;
5. Perencanaan Pembangunan USB SMK Negeri Cimanggu yang tidak dilaksanakan karena belum ada kejelasan tanah atau hibah tanah antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Ruang Kelas Sekolah (Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Plupuh Kab Sragen) Pekerjaan dalam satu locus yang sama (SMAN 1 Plupuh), sehingga waktu pelaksanaan harus bergantian; Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
7. Sisa Lelang dari pengadaan seragam siswa miskin sebesar Rp 924.438.450 anggaran semula untuk seragam siswa miskin sebesar Rp 12.822.450.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp11.898.011.550 ;

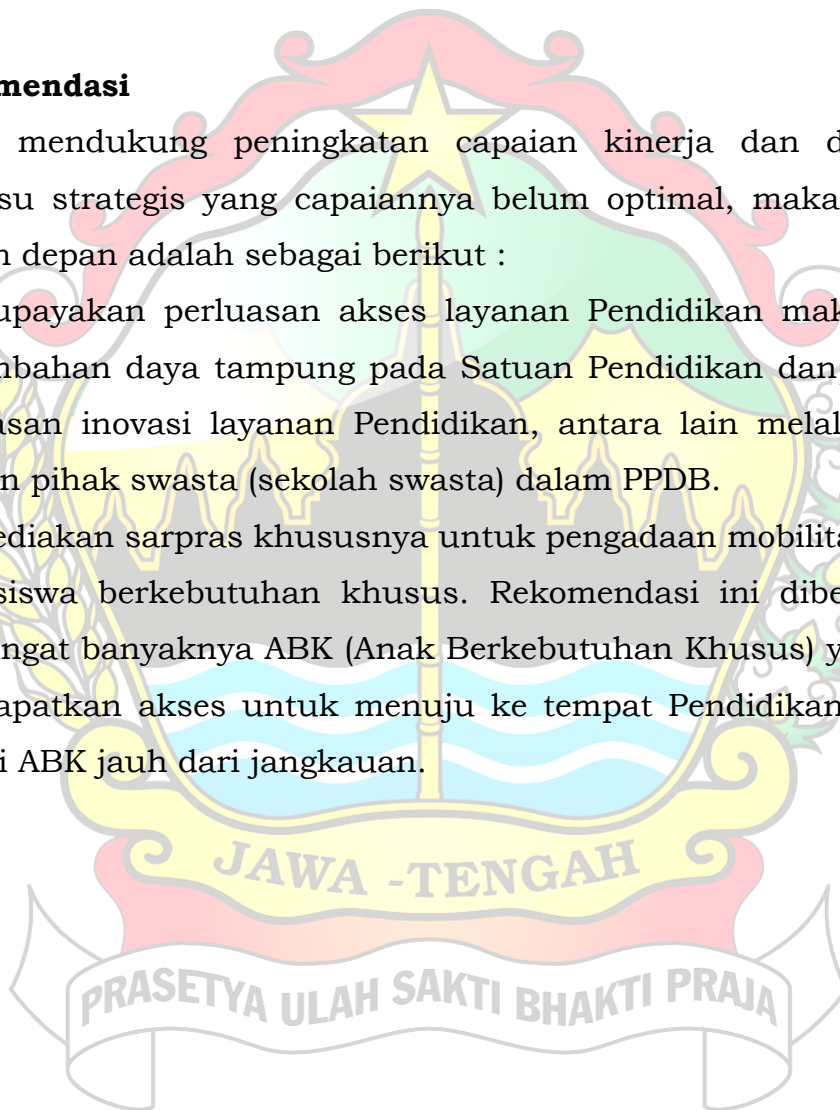
Sedangkan untuk kegiatan lain seperti sisa belanja gaji dan sisa belanja perjalanan dinas, makan minum, dll merupakan efisiensi belanja karena digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dipenuhi sesuai target meskipun masih terdapat beberapa target yang belum tercapai di tahun 2024.

4.2 Rekomendasi

Guna mendukung peningkatan capaian kinerja dan dalam rangka menjawab isu strategis yang capaiannya belum optimal, maka rekomendasi untuk tahun depan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan akses layanan Pendidikan maka diperlukan penambahan daya tampung pada Satuan Pendidikan dan/atau melalui perluasan inovasi layanan Pendidikan, antara lain melalui Kerjasama dengan pihak swasta (sekolah swasta) dalam PPDB.
2. Menyediakan sarpras khususnya untuk pengadaan mobilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Rekomendasi ini diberikan karena mengingat banyaknya ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang kesulitan mendapatkan akses untuk menuju ke tempat Pendidikan dikarenakan Lokasi ABK jauh dari jangkauan.







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Telp. (024) 3515301 – 3546001 Faximile (024) 3520071
Semarang 50132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003



PROGRAM	ANGGARAN	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.448.869.771.000	APBD
2 Program Pengelolaan Pendidikan	3.403.728.560.000	APBD
3 Program Pengembangan Kurikulum	896.000.000	APBD
4 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.120.000.000	APBD
5 Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.222.700.000	APBD
6 Program Pengembangan Kebudayaan	7.640.000.000	APBD
7 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	12.741.000.000	APBD
8 Program Pembinaan Sejarah	955.000.000	APBD
9 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.325.000.000	APBD
10 Program Pengelolaan Permuseuman	3.750.000.000	APBD
	8.882.248.031.000	

Semarang, 10 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telpn (024) 3515301
Faximile (024) 3520071 laman HTTP : www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	53,82
1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16,89
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayani	%	23,44
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31,7
2	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	83,29
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85,94
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	67,25
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70,97
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,07
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,28
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25

Semarang, 25 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003